



KODE ARTIKEL : PKM-7

## ASEAN Village Leader dalam Pembangunan Perdesaan di Era Global

Agus Haryanto<sup>1\*</sup>, Tundjung Linggarwati<sup>2</sup>, Dias Pabyantara SM<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman

\*email korespondensi : agus.haryanto@unsoed.ac.id

### ABSTRAK

Globalisasi menuntut kesiapan di berbagai wilayah termasuk desa yang juga terimbas oleh globalisasi, untuk itu Kementerian Desa menggalakkan berbagai program pembangunan desa agar desa mampu mandiri dan sejahtera. Kerjasama ASEAN dan mitranya (ASEAN plus three) diwujudkan dalam model pembangunan desa yang disebut sebagai ASEAN +3 Village Leaders Exchange Programme (ASEAN +3 VLEP), dimana program ini mengacu pada pencapaian tujuan kemandirian dan kesejahteraan desa dengan memaksimalkan peran kepala desa sebagai tokoh sentral dalam pembangunan desa. Tulisan ini membahas tiga hal yaitu mengenai (1) bagaimana konsep pembangunan ASEAN Village Leader, (2) relevansi pembangunan ASEAN Village Leader dalam Pembangunan Internasional, dan (3) Studi Kasus ASEAN Village Leader Program sejak tahun 2019.

**Kata kunci:** Desa, ASEAN Village Leader, ASEAN, Pembangunan Internasional, Pembangunan Perdesaan.

### PENDAHULUAN

ASEAN Village Leader Plus Three adalah sebuah inisiatif yang lahir dari kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN dengan tiga negara mitra utama di kawasan Asia Timur, yaitu China, Jepang, dan Korea Selatan. Selanjutnya, program ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antar masyarakat di tingkat desa, dengan tujuan meningkatkan pembangunan pedesaan, memberdayakan pemimpin komunitas, dan memperkuat konektivitas antara negara-negara peserta melalui berbagi pengetahuan, teknologi, dan praktik terbaik (ASEAN Secretariat, 2023). Inisiatif dari ASEAN Village Leader Plus Three ini merupakan komitmen ASEAN untuk membangun komunitas yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dalam hal ini, pembangunan tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga di daerah pedesaan. Selain itu, dengan melibatkan Jepang, Korea, dan China, maka inisiatif ini diharapkan nantinya akan mendapatkan dukungan teknologi dan sumber daya dari tiga ekonomi terbesar di Asia Timur tersebut.

Sebagai contoh, dari Setkab.go.id (2019) menyertakan pemberitaan mengenai tiga kepala desa dari Indonesia dikirim ke forum *The 8th ASEAN Plus Three Village Leaders Exchange Programme* di Yunnan, Tiongkok, pada tahun 2019. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para pemimpin desa dalam bidang pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia. Forum ini menjadi wadah pertukaran ide dan pengalaman antar pemimpin desa dari berbagai negara ASEAN. Mereka yang terpilih berasal dari Sulawesi Selatan, Bengkulu, dan Kalimantan Timur. Pemilihan mereka didasarkan pada kinerja dan keberhasilan mereka dalam mengembangkan desa masing-masing, terutama dalam pemberdayaan masyarakat dan inovasi desa. Para kepala desa ini dianggap mampu mewakili Indonesia untuk berbagi pengalaman sukses mereka dalam mengelola pembangunan desa yang berkelanjutan. Selain itu, keikutsertaan mereka diharapkan dapat membangun jejaring kerja internasional dan mengadopsi praktik-praktik terbaik dari negara lain. Hal ini diharapkan dapat memperkuat kerjasama antar negara dalam pengembangan pedesaan serta meningkatkan peran desa dalam pembangunan ekonomi regional.

Pada tahun 2021, ada hampir 50 pejabat dan perwakilan akar rumput dari departemen terkait di Kamboja, Indonesia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Tiongkok, kedutaan besar untuk Tiongkok, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, dan pakar, cendekiawan, dan perwakilan media menghadiri ASEAN Plus Three Village Leader Exchange Program. Li Xin, Wakil Direktur Jenderal IPRCC, menghadiri upacara pembukaan dan menyampaikan pidato. Maha Ahmed, Wakil Direktur Program Pangan Dunia PBB (WFP) di Tiongkok, menjadi moderator pada sesi presentasi, dan Bapak Miguel Musngi, Pejabat Senior, Divisi



Pengentasan Kemiskinan dan Gender Sekretariat ASEAN, menyampaikan pidato penutup. Para peserta sepakat bahwa dalam konteks pandemi COVID-19, sangatlah penting untuk lebih memperkuat pertukaran dan kerja sama, serta berbagi pengalaman di bidang pengentasan kemiskinan dan pembangunan pedesaan melalui acara ini (IPRCC, 2021).



Foto kegiatan pada tahun 2021. Sumber IPRCC (2021)

Program *ASEAN Plus Three Village Leaders Exchange Programme* semakin relevan, terutama karena banyaknya penduduk ASEAN yang tinggal di wilayah pedesaan. Sekitar 60% dari populasi ASEAN tinggal di desa-desa, sehingga pengembangan pedesaan menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di wilayah tersebut. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para pemimpin desa dalam pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan revitalisasi pedesaan, yang merupakan bagian penting dari strategi untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di kawasan ini (IPRCC, 2019).<sup>1</sup> Program ini juga telah berkembang menjadi jaringan kolaboratif seperti *ASEAN Village Network (AVN)*, yang diluncurkan pada tahun 2023. AVN berfokus pada kerjasama antar desa untuk meningkatkan kualitas hidup warga desa ASEAN melalui berbagai inisiatif, seperti pengembangan desa wisata, digitalisasi desa, dan produk desa unggulan. Ini menunjukkan bahwa program ini terus beradaptasi dan relevan dengan tantangan pembangunan pedesaan yang terus berubah (Sugito, 2024).<sup>2</sup>

## KONSEP PEMBANGUNAN DESA

Pembangunan desa dan kawasan pedesaan (*Rural Development*) merupakan isu dalam konteks pembangunan global. Hal ini sejalan dengan poin pembangunan global berkelanjutan, antara lain:

1. United Nations (PBB) mendorong keterkaitan urban (*rural areas*) dalam konteks *platform SDGs 2030* dalam hal ini yaitu keterlibatan kawasan pedesaan dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan

<sup>1</sup> <https://www.iprcc.org/article/44hz7ZfQFi2>

<sup>2</sup> Sugito MH. <https://theaseanmagazine.asean.org/article/asean-villages-network-a-rural-development-and-poverty-eradication-strategy-to-achieve-the-sustainable-development-goals-in-the-asean-region/>



2. Pendekatan *Integrated Rural Development* (IRD) dipelopori lembaga-lembaga donor internasional salah satunya World Bank. Tujuan dari *Integrated Rural Development* adalah membantu masyarakat pedesaan yang hidup di bawah garis kemiskinan untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan memberdayakan masyarakat miskin dengan membantu mereka berkembang di setiap aspek kehidupan. Salah satu program ini yaitu dengan memberikan aset dan masukan produktif kepada kelompok sarasannya yang dapat berupa sektor primer, sekunder atau tersier dan diberikan sebagai bantuan keuangan kepada masyarakat desa dalam bentuk subsidi pemerintah serta pinjaman atau kredit dari lembaga keuangan.
3. OECD (*Organisation for Economic Cooperation and Development*) mendorong paradigma baru pembangunan desa yang disebut *New Rural Policy* (NRP). Untuk pertama kalinya, diusulkan kerangka konseptual yang memposisikan kebijakan pedesaan sebagai strategi investasi yang mendorong daya saing di daerah pedesaan. Ini adalah perubahan radikal dari program subsidi biasa yang ditujukan untuk sektor tertentu.  
  
Paradigma Baru Pedesaan (*New Rural Policy*) merupakan jawaban atas perubahan kondisi di daerah pedesaan dimana bukti statistik menunjukkan bahwa pertanian bukan lagi sumber utama pekerjaan dan pendapatan pedesaan. Bahkan beberapa daerah pedesaan menunjukkan kinerja yang sejalan dengan daerah perkotaan terutama dalam hal pertumbuhan ekonomi. Hal tersebutlah yang kemudian mendorong pemerintah dalam mengubah pola pikir dalam pengambilan kebijakan di pedesaan.
4. *International Fund for Agriculture Development* (IFAD), Lembaga PBB yang special menaruh perhatian terhadap pembangunan masyarakat pedesaan. Program IFAD antara lain membantu mengurangi kerentanan petani terhadap guncangan eksternal yang dapat dipicu oleh iklim yang ekstrim sebagai akibat dari perubahan iklim, bencana alam atau gejolak pasar global.
5. *Rural Development as a part of economic diplomacy*. Pembangunan di kawasan pedesaan merupakan bagian dari diplomasi ekonomi dimana pelaksanaan kebijakan luar negeri untuk membangun relasi ekonomi dengan pihak luar dilaksanakan melalui peran aktif negara dan tidak hanya mengandalkan kekuatan pasar untuk mencapai kesejahteraan masyarakat tetapi juga melalui pengelolaan pemanfaatan sumberdaya ekonomi di pedesaan.
6. Keterkaitan *village* (desa) dengan *global marketplace*. Adanya pasar bebas yang didorong oleh tingginya arus globalisasi membuka peluang tersendiri terhadap pedesaan untuk memperluas jangkauan pasar bagi komoditas masing-masing sehingga berdampak pada meningkatnya perekonomian desa.
7. *Village people* sebagai *citizen diplomacy*. Yaitu keterlibatan masyarakat desa dalam aktivitas diplomasi dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pihak luar negeri baik itu dalam bidang ekonomi, sosial maupun budaya.

## PEMBANGUNAN DESA DI INDONESIA TAHUN 2020-2024



Bentuk Strategi Kolaboratif Dalam Pembangunan Desa Terpadu Tahun 2020-2024 dibagi ke dalam beberapa aspek seperti lahan, budidaya dan sarana prasarana, pendampingan, permodalan, kelembagaan dan kemitraan, panen dan pascapanen, produk turunan, serta pemasaran dan tata niaga.

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>Lahan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemilikan lahan</li> <li>2. Kalster/ Sentra Penanaman</li> <li>3. Perhutanan Sosial/ Lahan BUMN</li> <li>4. Kesesuaian Iklim</li> </ol>  | <p>Budidaya dan Sarpras</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bibit unggul</li> <li>2. Pola penanaman</li> <li>3. Pupuk</li> <li>4. Perawatan</li> <li>5. Pengendalian hama</li> <li>6. Penerapan teknologi dan Inovasi</li> <li>7. Smart-Farming</li> </ol>   | <p>Pendampingan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan tenaga penyuluh/ pendamping desa</li> <li>2. Perguruan tinggi</li> <li>3. Pelatihan, Bintek, Studi Banding</li> <li>4. Produsen</li> <li>5. Dunia Usaha</li> <li>6. Komunitas Rempah</li> </ol>                           |
| <p>Permodalan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. APBN</li> <li>2. Investasi</li> <li>3. CSR</li> <li>4. Kemitraan</li> <li>5. Perbankan</li> </ol>   | <p>Kelembagaan dan Kemitraan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peran Pemerintah</li> <li>2. Peran BUMDes/BUMDes Bersama</li> <li>3. Penguatan kelompok tani</li> <li>4. Kemitraan BUMN/BUMD/Swasta/ Kampus</li> <li>5. <i>Startup</i></li> </ol>   | <p>Panen dan Pasca Panen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pola panen</li> <li>2. Teknologi tepat guna cara panen</li> <li>3. Pengolahan pasca panen untuk nilai tambah</li> <li>4. Pendampingan panen dan pasca panen</li> <li>5. <i>Smart farming</i></li> <li>6. Listrik</li> </ol> |
| <p>Produk Turunan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan pengolahan produk</li> <li>2. Sarana dan prasarana pengolahan</li> <li>3. Teknologi terapan dan inovasi</li> <li>4. Pola pendampingan</li> <li>5. Hak Paten</li> <li>6. Ekspektasi pasar untuk produk tertentu</li> </ol> | <p>Pemasaran dan Tata Niaga</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spesifikasi produk rempah</li> <li>2. Targeting pasar (internasional dan dalam negeri)</li> <li>3. Sistem <i>logistic</i></li> <li>4. Kolaborasi</li> <li>5. Iklim regulasi</li> <li>6. Diplomasi ekonomi</li> <li>7. <i>Digital platform ke market place</i></li> </ol> |  |

Pembangunan desa sangat erat kaitannya dengan pembenahan infrastruktur dan telah menjadi program prioritas pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Ketersediaan infrastruktur akan menentukan lokasi kegiatan ekonomi dan jenis kegiatan bahkan sektor yang dapat berkembang di suatu daerah. Pengembangan infrastruktur yang baik akan mengurangi efek jarak antardaerah, menghubungkan dan mengintegrasikan pusat-pusat kegiatan ekonomi baik daerah, nasional maupun internasional dengan pasar-pasarnya dengan biaya yang rendah. Transportasi dan jaringan infrastruktur komunikasi maupun energi yang baik merupakan prasyarat untuk akses yang lebih baik bagi investor maupun masyarakat dalam setiap kegiatan perekonomian. Ketersediaan infrastruktur yang baik juga akan mendukung daya saing sektor riil, memberikan penguatan pada iklim investasi dan dunia usaha. Kelancaran jaringan distribusi dan lalu lintas antarwilayah akan mengurangi tekanan disparitas harga, mendukung tercapainya skala ekonomi, dan meningkatkan efisiensi produksi. Anggaran belanja untuk pembenahan infrastruktur dapat diperoleh dari dana luar negeri.

## ASEAN VILLAGE LEADER DI INDOENSIA

Di Indonesia, terdapat beberapa program yang terkait dengan *ASEAN Village Leaders Exchange Programme* seperti program yang berfokus pada pengembangan pedesaan dan transformasi digital. Diantara



program yang terkait adalah *Smart Village* yang merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia dan *International Telecommunication Union* (ITU). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan melalui solusi digital seperti layanan kesehatan berbasis teknologi, inovasi pertanian, dan pengembangan keterampilan literasi digital. Strategi ini dirancang untuk menjawab tantangan lokal dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan akses terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi (ASEAN Magazine, 2024). Programmenunjukkan hasil yang cukup positif. Program ini meningkatkan akses terhadap layanan digital yang mendukung berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, pertanian, dan keuangan di daerah pedesaan. Dengan model pengembangan yang terintegrasi, program ini berhasil menurunkan tingkat pengangguran terbuka di desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri dari 2.894 desa menjadi 5.559 desa dalam periode 2014 hingga 2019. Hal ini juga berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan di Indonesia, dari lebih dari 20% menjadi 9,4% pada tahun 2019 (Iskandar, 2020)<sup>3</sup>.

Selain itu, pemerintah Indonesia terus mendorong keberlanjutan program ini dengan membentuk duta digital di berbagai desa untuk mempromosikan literasi digital dan inovasi lokal. Program ini tidak hanya berkaitan dengan digitalisasi, tetapi juga mencakup pengembangan ekonomi, tata kelola pemerintahan desa, dan kualitas hidup masyarakat pedesaan melalui konsep seperti *smart environment*, *smart mobility*, dan *smart economy* (Antara, 2021).<sup>4</sup>

Indonesia juga aktif terlibat dalam *ASEAN Village Network* (AVN) dimana program ini mempromosikan pembangunan pedesaan melalui kerjasama antar negara anggota ASEAN. AVN berfokus pada inisiatif seperti pengembangan desa wisata, transformasi digital desa, dan promosi produk lokal melalui model *One Village One Product* (OVOP). Jaringan ini memfasilitasi berbagi pengetahuan dan praktik terbaik di antara negara-negara ASEAN, serta berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan.

AVN telah berhasil menciptakan platform kerjasama yang kuat di antara negara-negara ASEAN. Misalnya, dalam kerangka kerja AVN, desa-desa anggota ditunjuk sebagai *Pilot Project Villages* untuk berpartisipasi dalam program-program pelatihan dan pengembangan kapasitas. Program ini mencakup pelatihan tentang keberlanjutan lingkungan, kewirausahaan, dan pengelolaan sumber daya lokal, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu, AVN juga mendorong keterlibatan pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan, serta menciptakan peluang ekonomi baru melalui promosi produk lokal dan pemasaran bersama (Sugito, 2024).

## SIMPULAN

ASEAN Village Leader Plus Three adalah inisiatif yang ambisius dan strategis untuk mendorong pembangunan pedesaan di kawasan ASEAN melalui kolaborasi dengan tiga negara mitra utama, yaitu China, Jepang, dan Korea Selatan. Dengan fokus pada pemberdayaan pemimpin desa, adopsi teknologi, dan peningkatan kapasitas, program ini berupaya untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh komunitas pedesaan di ASEAN. Meskipun ada tantangan dalam pelaksanaannya, dampak positif yang telah dihasilkan menunjukkan bahwa inisiatif ini memiliki potensi besar untuk terus berkontribusi pada pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Asia Tenggara.

## DAFTAR PUSTAKA

<sup>3</sup> Tulisan halim Iskandar di <https://theaseanmagazine.asean.org/article/a-smart-village-approach-in-indonesia-opportunities-for-rural-advancement/>

<sup>4</sup> <https://www.antaraneews.com/berita/2589029/mendes-pdtt-harapkan-program-smart-village-dapat-berkelanjutan>



- ASEAN Secretariat. (2023). *ASEAN Village Leader Plus Three: Bridging the Urban-Rural Gap*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- ASEAN-China Centre. (2021). *ASEAN Village Leader Plus Three: Enhancing Rural Development through Cooperation*. Beijing.
- Korea Institute for International Economic Policy. (2023). *Korea's Role in ASEAN Village Leader Plus Three*. Seoul: KIEP.
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2022). *Japan's Contribution to ASEAN Village Leader Plus Three Initiative*. Tokyo: Ministry of Foreign Affairs.